

## Institusionalisasi Partai Aceh: Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik

Rizkika Lhena Darwin  
(Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)  
Email: rizkikadarwin@gmail.com

### Abstract

*In a democratic transition in post-conflict areas, the institutionalization of political party influence on the consolidation of the party so the impact on the realization of a political strategy. This paper wants to describe the patterns used in the process of institutionalization of the Aceh Party as a local political party in Aceh, where there is a transformation from insurgents to the political parties as well as the achievement of the consolidation of the party. This paper concludes that the party born from a guerrilla movement requires a pattern of patronage to save his authority on the realization of democratic politics in the post-conflict era. It is considered essential to achieve the consolidation of the party both in internal and external (read: constituent) party.*

**Keywords:** *institutionalization, party politics, patronage, consolidation*

### Abstrak

*Dalam transisi demokrasi di daerah pasca konflik, pelebagaan partai politik sangat berpengaruh terhadap konsolidasi partai sehingga berdampak pada realisasi strategi politik. Tulisan ini ingin menggambarkan pola yang digunakan dalam proses institusionalisasi Partai Aceh sebagai partai politik lokal di Aceh, dimana terjadi transformasi dari gerilyawan ke partai politik serta pencapaian konsolidasi partai. Tulisan ini menyimpulkan bahwa partai yang lahir dari gerakan gerilya membutuhkan pola patronase untuk menyelamatkan otoritasnya pada realiasi politik di era demokrasi pasca konflik. Hal ini dianggap penting untuk mencapai konsolidasi partai baik di internal maupun eksternal (baca:konstituen) partai.*

**Kata kunci:** *institusionalisasi, partai politik, patronase, konsolidasi*

---

### PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin menjelaskan pelebagaan partai politik lokal dalam transisi demokrasi di Aceh pasca konflik. Bagaimana institusionalisasi partai politik lokal untuk mencapai konsolidasi partai dalam situasi politik pasca konflik. Beberapa hal menariknya untuk diteliti. Pertama, pada transisi demokrasi pasca konflik, partai politik cenderung melakukan pola patronase dalam hal maksimalisasi bekerjanya mesin partai untuk mencapai tujuan politik. Hal tersebut didasarkan pada fenomena suara mayoritas yang didapatkan oleh Partai

Aceh pasca pemilu 2009. Kedua, fenomena tersebut dapat melihat bagaimana institusionalisasi partai yang dilakukan dengan pola patronase mempengaruhi konsolidasi partai tersebut. art) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

Saat ini Indonesia telah membuka peluang kelahiran partai politik lokal, seperti halnya di Provinsi Aceh. Transisi demokrasi pasca konflik berkontribusi besar dalam pertumbuhan mesin partai. Kehadiran partai politik lokal di Aceh menggambarkan dua hal. Pertama, keberadaannya menjelaskan bahwa partai politik nasional belum mampu mengako-

modir kepentingan masyarakat lokal. Kedua, dalam konteks Aceh, masyarakat mengalami kepenatan dengan keberadaan partai politik nasional yang bermain pada tataran elitis perpolitikan nasional dan tidak mampu memberi jalan atas konflik panjang yang dialami oleh masyarakat.

Eksistensi partai politik lokal di Aceh pasca pemilu 2009 didominasi oleh partai Aceh. Partai Aceh merupakan wujud transformasi gerakan eks-kombatan GAM, dari gerakan separatis gerilyawan menuju panggung politik formal. Partai ini menjadi satu-satunya partai lokal yang melewati ambang batas *electoral threshold* (<http://kip-acehprov.go.id/>). Secara otomatis menjadi peserta pemilu 2014. Dengan suara mayoritasnya penguasaan parlemen Aceh dan eksekutif maka akan memudahkan mereka merealisasikan tujuan politiknya. Oleh karena itu penelitian ini ingin menelusuri bagaimana institusionalisasi Partai Aceh dalam menghadapi transisi demokrasi dalam tataran politik lokal pasca konflik. Dimana proses institusionalisasi ini akan memperlihatkan pola patronase dalam mencapai konsolidasi partai dan merealisasikan tujuan politik partai.

Tulisan ini akan menggunakan teori insitusionalisasi partai politik oleh Randall dan Svasand, sebuah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (Randall and Svasand. 2002). Dimensi pelebagaan partai politik versi Randall dan Svasand

**Tabel 1**  
**Dimensi Pelebagaan Partai Politik**

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi Kebijakan
Kesikapan	Identitas Nilai	Reifikasi

Sumber: Randall dan Svasand (2002) dalam Pamungkas (2011: 73)

Derajat kesisteman pelebagaan partai politik diukur dari beberapa hal. Pertama, asal-usul partai. Kedua, sumber daya yang dimiliki partai. Ketiga, kepemimpinan, yaitu siapa aktor determinan dan paling disegani dalam partai. Keempat, faksionalisme, menyoroti siapa yang menentukan dalam pembentukan faksi-faksi di tubuh partai. Kelima, implikasi klientalisme, menyorot bagaimana partai memelihara relasi dengan anggota dan simpatisan. Kelima derajat kesisteman tersebut dapat menjadi tolak ukur seberapa besar derajat kesisteman sebuah partai.

Identitas nilai mengacu pada dua hal. Pertama, hubungan partai politik dengan kelompok populis tertentu. Kedua, pengaruh klientalisme dalam organisasi, bersifat instrumental, atau lebih bersifat ideologis. Identitas nilai lebih melihat hubungan ketersambungan partai dan konstituennya.

Otonomi keputusan melihat dua hal, pertama, ketergantungan partai kepada aktor luar. Kedua, tingkat ketentuan keputusan partai Kaitannya dengan keberlangsungan hidup sebuah partai, otonomi keputusan akan sangat berkontribusi agar partai tetap stabil.

Reifikasi merujuk pada eksistensi partai yang ditentukan oleh imajinasi publik. Reifikasi erat kaitannya dengan politik simbol dan pencitraan yang dimainkan partai untuk meraih loyalitas electoral konstituen.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Langkah ini diambil untuk membantu menemukan dinamika sosial partai Aceh sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Data dari hasil studi kepustakaan yang merupakan data sekunder mengenai pasukan proses institusionalisasi inong balee yang didapatkan dari catatan, transkrip, buku, notulensi, agenda, media

massa, laporan penelitian, jurnal, majalah dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pelebagaan Partai Aceh: Transformasi Gerilyawan menjadi Partai Politik*

Berbicara pelebagaan partai politik yang menggunakan teori Randall dan Svasands sebagai starting point sebenarnya akan menggambarkan kompleksitas Partai Aceh sebagai sebuah partai politik. Karena konsep yang dikemukakan oleh Randall dan Svansand mengurai pelebagaan tidak hanya dilihat dari internal partai sendiri namun juga dari eksternal partai itu yang secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat pelebagaan partai.

Proses transformasi partai Aceh sebagai sebuah partai politik meretas jalan panjang yang masih dapat dilihat sebagai wujud optimisme perkembangan teman-teman eks-kombatan sebagai sebuah partai. Pada dasarnya gerakan gerilyawan di-manage dalam sebuah struktur sebagai acuan, namun realisasi struktur yang dimainkan oleh sebuah partai akan sangat berbeda dengan pola yang dimainkan oleh kelompok gerilyawan. Dalam sebuah partai ada proses demokrasi, kompetisi, dukungan internal eksternal dan sebagainya. Sedangkan gerakan gerilyawan merupakan sebuah kelompok yang terstruktur secara hierarki komando dengan menciptakan musuh bersama agar tercipta kesolidan dalam berlangsungnya sebuah gerakan.

Tingkat pelebagaan partai Aceh sebagai awal akan dilihat dari aspek kesisteman. Aspek kesisteman berperan penting dalam melihat tingkat kelembagaan partai. Karena akan memperlihatkan bahwa Partai Aceh memiliki tingkat kesisteman yang masih lemah sebagai sebuah partai politik. Argumen ini didasarkan pada pola lama yang masih digunakan Partai Aceh saat ini. Pola tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga layak

digunakan dalam iklim demokrasi. Keberlangsungan interaksi Partai Aceh menjadi sebuah struktur memperlihatkan perlunya adaptasi kultur komando *top-down* dalam sebuah iklim demokratis. Proses pelaksanaan fungsi partai terlihat dari urutan, persyaratan, prosedur, maupun mekanisme. Partai Aceh memperlihatkan pola patronase dalam proses pelaksanaan fungsi partai. Dapat dilihat pada proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai menurut urutan dan persyaratan masih dipengaruhi oleh struktural GAM. Struktural GAM tidak terpola secara teknis dalam Partai Aceh. Namun struktural GAM berganti menjadi pola patronase dengan titik sentral pada elit-elit GAM. Misalnya dalam pengambilan keputusan, Partai Aceh menggunakan mekanisme kultur patronase dalam kepemimpinan partai.

Sebuah partai tidak terlepas dari prosedur dalam pelaksanaan fungsi partai. Prosedur menghendaki aturan main untuk mengatur pola perilaku dan sikap partai. Hakikinya partai sebagai sebuah organisasi memerlukan prosedur untuk menghindari kesemerautan partai sebagai sebuah organisasi yang menyaratkan keteraturan agar tercipta stabilitas. Aturan Partai Aceh sebagai sebuah lembaga untuk melihat tingkat pelebagaan masih lemah dalam pelaksanaan prosedur secara demokratis. Suara para elit masih sangat mendominasi pelaksanaan prosedur partai. Partai Aceh mencerminkan hal itu terhadap dominasi suara para petinggi partai. Seperti halnya suara Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya menjadi begitu determinan dalam aktivitas rapat, pelatihan dan bentuk kegiatan kepartaian lainnya. Contohnya pada rapat antar bidang dalam dewan pimpinan Partai Aceh, dimana masing-masing ketua bidang (13 bidang) bertemu. Ada pembahasan yang berujung pada terjadi deadlock. Muzakir Manaf yang ketika itu memiliki posisi sebagai ketua umum Partai Aceh, dengan serta merta argumennya diamini oleh peserta rapat. Tidak berbeda kekuatan otoritas Muhammad

Yahya yang posisinya sebagai sekretaris Partai Aceh. Sehingga Muhammad Yahya kerap masuk dalam sebuah bidang dan melakukan intervensi didalamnya. Dalam sebuah bidang sekalipun otoritas elit dapat menghegemoni aktivitas partai.

Di sini lain kesisteman dapat terlihat ketika partai menegakkan mekanisme dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Partai Aceh tidak menegakkan mekanisme demokratis dalam penegakkan mekanisme partai. Misalnya saja dalam pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Partai Aceh. Terpilihnya Muzakir Manaf sebagai ketua umum Partai Aceh dan Muhammad Yahya sebagai sekretaris Partai Aceh dilakukan bukan melalui mekanisme demokratis atau pemilihan. Proses demokratis dengan mengadakan musyawarah bersama yang lazim dilakukan oleh partai politik lainnya. Pemilihan pimpinan partai Aceh hanya melewati tahap yang sangat elitis. Karena keterpilihannya dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka. Pendapat pimpinan GAM sangat diprioritaskan bahkan dijadikan acuan dalam keberlangsungan partai. Pada tahun 2013 diperlihatkan penggambaran yang tidak jauh berbeda dengan proses di periode sebelumnya, dimana keterpilihan Muzakir Manaf ditunjuk secara aklamasi. Proses penunjukkan tersebut mensakralkan pola patron yang masih sangat kental dimana otoritas penuh terletak pada para elit eks-GAM.

Menguatnya otoritas para elit di dalam tubuh Partai Aceh tidak mendapat protes yang signifikan. Apakah atas keputusan penempatan jabatan elit partai atau dalam kebijakan partai lainnya. Hal ini mencerminkan karakter patronase dalam kepemimpinan partai sangat menguat. Bertahannya determinasi elit GAM terhadap partai Aceh semakin menggiring kepada pelemahan pelemagaan partai itu sendiri. Elit yang paling dominan dalam mempengaruhi perjalanan Partai Aceh ialah Malik Mahmud. Walaupun di

samping Malik Mahmud ada beberapa elit senior yang ikut berkontribusi tetapi kuatnya otoritas suara mereka belum dapat menggeser kekuatan Malik Mahmud dalam tubuh partai Aceh. Karena ia orang yang dituakan dalam struktural GAM. Secara otomatis ia akan memiliki pengaruh yang sama dalam struktural Partai Aceh, di mana merupakan transformasi dari kelembagaan GAM.

Mekanisme yang berlangsung dalam Partai Aceh hampir sama dengan mekanisme yang berlangsung dalam tubuh GAM. Proses pelemagaan bisa saja tidak dibangun berdasarkan konsensus organisasi. Pelemagaan dibangun dengan mengarahkan agar organisasi GAM terikutserta dalam kondisi politik yang berbeda pasca konflik. Adanya upaya menyesuaikan agar partai dapat diterima dalam tataran politik di Aceh saat ini sebagai sebuah mesin politik yang bekerja untuk meraih otoritas dalam tataran pemerintahan Aceh. Dengan kata lain kelembagaan Partai Aceh dibangun sebagai bentuk penyesuaian terhadap tata kelola dan keharusan administratif lembaga kepartaian yang diatur UUPA sebagai terjemahan kesepakatan damai atau kerelaan GAM untuk berada dalam koridor bingkai NKRI.

Indikasi lemahnya pelemagaan yang di tunjukkan dalam kesisteman Partai Aceh. Ada hal menarik dari mekanisme perekrutan bakal calon legislatif dari Partai Aceh. Partai Aceh sudah sedikit membuka diri untuk mengadopsi praktik demokratis. Praktik demokratis mulai ditunjukkan pada proses kandidasi khususnya untuk kursi pemilu legislatif. Walaupun menurut hemat saya, praktik demokratis yang dijalankan lebih menggambarkan pola pragmatism. Setidaknya menjadi langkah awal agar individu eksternal GAM dapat mengakses Partai Aceh sebagai salah satu wadah politik untuk masuk dalam struktur negara. Misalnya saja mekanisme perekrutan calon anggota legislatif dari Partai Aceh yang tidak diusung berdasarkan atas garis komando dari atas. Melainkan diusulkan dari bawah

melalui mesin partai yang bernama panitia sekureung (tim Sembilan). Panitia Sekureung (panitia Sembilan) yang merepresentasikan 9 elemen masyarakat. Terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh KPA, representasi perempuan, akademisi, dan elemen dari PA sendiri. Proses perekrutan demokratis ini lebih mengarah pada pragmatisme. Dimana mekanisme perekrutan cenderung didasarkan pada faktor popularitas individu. Dengan kata lain PA juga mendekati dan mempertimbangkan orang yang populer di daerah pemilihan. Dengan demikian, hal positif yang dapat serap ialah keinginan Partai Aceh untuk mulai membuka diri bagi orang di luar GAM mengakses partai ini.

Keanggotaan Partai Aceh memiliki tingkat kesisteman yang cukup kuat. Terdapat kesepakatan di internal PA bahwa yang duduk sebagai pengurus Partai Aceh dari tingkat pusat (dewan pimpinan partai aceh) sampai di tingkat ranting (DPR) tidak boleh menjadi pejabat atau menduduki kursi lembaga negara (eksekutif, legislative, dan badan-badan birokrasi). Kebijakan ini menjadi langkah awal untuk menjaga stabilitas partai akibat tidak fokus bekerjanya mesin partai. Secara keanggotaan atau membership, Partai Aceh cenderung inklusif. Dapat dilihat dari rekrutmen keanggotaan yg tidak didasarkan pada anggota, kepemilikan relasi, atau siapapun yang mengharuskan diri pro-GAM. Partai Aceh sudah mulai membuka diri pada individu yang tidak berasal dari GAM, baik itu orang jawa, non-Islam, mantan tentara dan lain-lain. Dengan catatan mereka merupakan masyarakat Aceh dan memperjuangkan daerah Aceh.

Partai Aceh sangat berkaitan dengan GAM, GAM yang pada saat ini telah bertransformasi mensipilkan diri dalam KPA (Komite Peralihan Aceh). Tapi struktural Partai Aceh berjalan beriringan tanpa timpang tindih perannya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan orang KPA sudah pasti merupakan Partai Aceh namun orang Partai Aceh belum tentu

mantan GAM. Profesionalisme mulai coba ditunjukkan oleh Partai Aceh. Di mana PA membatasi kadernya yang merupakan eks-kombatan tidak lebih dari 20% dari total kader yang duduk di DPRA. Hal ini didasari pada ketidaksiapan bersaing dengan aktivis dan individu yang lebih berpengalaman dalam legislatif.

Derajat kesisteman Partai Aceh dapat diukur dengan melihat beberapa hal. Pertama, Partai Aceh berasal dari gerakan separatis yang bertransformasi ke dalam partai politik. Pola yang di bawa sedikit banyak akan berlaku pola top down. Walaupun pola top down tersebut tidak murni seperti dalam gerilyawan. Kedua, sumber daya partai Aceh tergantung pada partai itu sendiri. Walaupun diakui Partai Aceh dikelilingi oleh beberapa lembaga informal yang mendukung kekuatannya sebagai sebuah kekuatan dari luar partai. Seperti halnya BRA sebagai lembaga informal yang turut mendukung dari sumber pendanaan partai. Karena BRA memiliki suntikan dana dari APBN dan APBD. Aktor atau individu yang mendominasi BRA, sekitar 90% adalah mantan eks-kombatan GAM. Ketiga, kepemimpinan dengan pola patronase. Secara struktur kepemimpinan partai berusaha profesional dengan struktur. Namun di sisi lain keberadaan elit eks-elit GAM masih sangat mempengaruhi kebijakan partai. Keberadaan Tuha peut (sebagai dewan penasehat) yang terdiri dari Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah dan Zakaria Saman. Keempat, faksionalisme cenderung menguat dalam tubuh Partai Aceh. Tepatnya pasca pemilukada. Pemilihan kepala daerah tahun 2006 memperlihatkan faksionalisasi. Pada pemilukada tahun 2012, memperlihatkan faksionalisme yang cenderung menguat. Karena masing-masing elit berusaha untuk memastikan dirinya memperoleh resources melalui penguasaan jabatan publik di Aceh. Tuntutan penghapusan calon independen dalam pilkada Aceh adalah upaya menutup pipa jalur kekuasaan bagi para elit GAM sehingga

tidak memecah suara dan terkanalisasi melalui satu pipa yaitu partai Aceh. Kelima, implikasi klientalisme. Pola patronase yang menitikberatkan segala keputusan dan kebijakan partai pada elit berimplikasi pada klientalism. Klientalism sendiri mengarah pada sesuatu hal yang mesti dibayarkan atau diberikan oleh anggota partai kepada para elit.

Aspek lain dalam melihat Partai Aceh ialah identitas nilai. Identitas nilai dapat dilihat dari ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Berbicara ideologi dan platform partai, pemudaran ideologi Partai Aceh mulai tampak. Ideologi “keacehan” mereka hanya dilihat sekedar hal yang bersifat *cover*. Bukan merupakan “keacehan” secara substantive. Proses terbentuknya Partai Aceh yang lahir dari sebuah gerakan sosial dapat menjadikannya lebih siap dari segi pembentukan ideologi. Membentuk dan proses membangun sebuah ideologi sebagai platform partai dalam merealisasi segala kebijakan politik bagi partai. Hari ini partai Aceh mengalami proses pergeseran, dimana ada pergeseran dari ideologis kepada tataran misi politik dalam penguasaan sumber daya kapital. Ideologi “keacehan” memudar seiring dengan semangat perebutan sumber daya atau *resources*. Kondisi ini melemahkan pelembagaan partai di tingkat internal. Kelahirannya dari sebuah gerakan sosial tidak serta merta menjamin partai akan mewujudkan keberlanjutan ideologi.

Partai Aceh masih memiliki basis pendukung yang dapat dikatakan permanen. Kaitannya dengan basis sosial pendukung Partai Aceh. Dukungan konstituen yang berasal dari eks-kombatan maupun pro GAM masih setia dengan perjuangan GAM dulu. Karena lahirnya partai aceh sebagai sebuah partai politik lokal tidak terbentuk atas dasar tujuan politik dalam ranah elektoral. Partai Aceh adalah sebuah transformasi sosial sebuah gerakan sosial ekstrim yang berbau separa-

tism dalam perlawanan melawan pemerintah RI. Sehingga konstituen pendukung masih terpelihara dengan baik.

Konstituen yang terpelihara ini lebih cenderung bersifat instrumentalis dalam hubungannya dengan partai. Hal ini didasarkan pada fakta arah perjuangan yang mengarah pada penguasaan *resources* kapital. Bukan berdasarkan perjuangan atas identitas “keacehan” seperti pada saat pergerakan GAM dulu. Hubungan yang bersifat instrumentalis biasanya berada pada tataran pragmatisme. Misalnya saja usulan pergantian antar waktu (PAW) kepada Darmuda, Samsul Bahri, Tgk. M. Yahya dan Tgk. Muhammad Wali Al-Khalidi yang merupakan anggota dewan perwakilan rakyat aceh (DPRA), diusulkan oleh Partai Aceh. Pengusulan PAW tersebut bukan didasarkan pada kebijakan atau ideologi partai yang dilanggar. Pengusulan tersebut didasarkan pada kehadiran mereka pada rapat mantan GAM/KPA se-Aceh Besar pada tanggal 13 Februari 2012 di Asrama Haji Banda Aceh. Kehadiran mereka dianggap oleh Partai Aceh sebagai bentuk dukungan pembentukan partai lokal yaitu “Partai Nasional Aceh” yang dimotori oleh Irwandi Yusuf. Walaupun menurut mereka (baca: Darmuda dan teman-teman) bahwa kapasitas hadirnya mereka di sana sebagai mantan anggota GAM/KPA.

Pelembagaan Partai Aceh dari aspek otonomi keputusan dapat diukur dengan melihat pengukuran dari seberapa besar pengaruh internal maupun eksternal partai dalam otonomi keputusan. Partai dipengaruhi oleh triangulasi kekuatan yaitu KPA, BRA, dan AFI. Ketiga kekuatan informal tersebut merupakan bagian dari PA apabila melihat individu keanggotaannya. KPA punya andil besar mempengaruhi kebijakan partai. Karena KPA berfungsi untuk memantau proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan GAM. KPA juga menjadi mesin politik partai dalam memasuki konstituen di akar rumput sampai dengan tingkat regional

terkecil yaaitu desa. Sehingga KPA sangat berkontribusi sebagai instrument pendukung yang dapat membentuk imajinasi publik, bahkan dengan serta merta dapat menambah suara bagi Partai Aceh. Dengan demikian KPA mempunyai relasi interdependensi bagi GAM.

Kehadiran BRA juga berpengaruh bagi partai aceh. Dari fakta personalia dalam BRA yang dipenuhi oleh orang-orang GAM. Dalam struktur kepengurusannya terdapat orang-orang Partai Aceh sekitar 90%. Kontribusi besar BRA adalah sebagai salah satu sumber dana bagi Partai Aceh. BRA adalah semacam lembaga sampiran negara yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD dimana sebagian dana tersebut dipersembahkan bagi eks-GAM. Sehingga garis simpul yang dapat ditarik dari BRA terhadap PA adalah relasi prakondisi, dimana BRA memperkuat posisi Partai Aceh dari segi pendanaan. Di sisi lain BRA juga sebagai ruang baru kaderisasi bagi Partai Aceh.

Lembaga informal lain di sekitar Partai Aceh ialah Aceh Future Institut (AFI). AFI mempengaruhi Partai Aceh dalam mendukung keputusan atau program yang akan diusung oleh partai. AFI merupakan LSM yang dipimpin oleh teungku Yahya Mahmud (mantan sekjen PA). Keberadaan AFI sendiri tidak terlepas dari keanggotaan Partai Aceh di dalamnya. Sehingga pada akhirnya AFI menjadi thinktank bagi Partai Aceh. Dapat dikatakan bahwa AFI adalah dapur kebijakan PA dalam memperlakukan Aceh. Beberapa program legislasi daerah (prolega) atau qanun yang digodog di AFI sehingga di sidang-sidang parlemen adalah formalitas lembaga legislatif saja.

Kehadiran lembaga-lembaga informal di sekitar Partai Aceh memperlihatkan Partai Aceh masih kuat pelembagaan dari aspek otonomi keputusan. Hal demikian didasarkan pada realita bahwa dari keberadaan lembaga-lembaga informal tersebut dari segi keanggotaan mengandung unsur Partai Aceh didalamnya. Lembaga-lembaga informal tersebut

berada dalam jaringan dan kendali Partai Aceh. Maka pada segi pengambilan keputusan akhir, Partai Aceh tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal partai. Pengambilan segala keputusan akhir akan berada di tangan para elit dalam pola patronase yang telah tertanam lama.

Kultur senioritas dalam kerangka patronase di tubuh GAM belum bisa beradaptasi dalam tatanan demokrasi yang menuntut adanya partisipasi aktif seluruh elemen internal Partai Aceh. Ketergantungan terhadap elit akan melemahkan partai dari sisi kemandirian secara berkelanjutan. Karena masih terpolasikap dalam setiap kebijakan atau keputusan yang di buat oleh partai aceh (DPP partai) harus dikonsultasikan kepada dewan penasehat (tuha peut). Tuha peut di duduki oleh para elit GAM yang merupakan sesepuh GAM. Misalnya saja seperti Malik Mahmud dan Bahtiar Abdullah tidak masuk dalam stuktur kepengurusan partai, tetapi sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan partai. Setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh partai Aceh harus dikonsultasikan dulu dengan dewan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa selain dalam struktur elit partai Aceh tidak berubah sebagai sebuah hasil tranformasi kelembagaan dari GAM. pemimpin politik yang dulu berada dipengasingan kemudian dikonversi dalam struktur "dewan penasehat" partai.

Aspek terakhir dalam menilai tingkat pelembagaan partai ialah dengan melihat pelembagaan Partai Aceh dari dimensi reifikasi. Reifikasi berkaitan dengan hubungan atau keterikatan Partai Aceh dengan konstituennya. Keberadaan partai Aceh telah tertanam dalam imajinasi publik. Di balik imajinasi positif dari partai yang tertanam di publik. Ada imajinasi negatif yang membentuk pola patronase antara partai dan konstituen. Imajinasi positif didasarkan atas platform "keacehan" yang dijual oleh Partai Aceh sebagai upaya meretas kesejahteraan. Di sisi lain, imajinasi publik negatif yang tertanam

hanya didasarkan pada jaminan kondisi perdamaian yang berkelanjutan pasca konflik berkepanjangan. Baik imajinasi positif maupun negative yang ditanamkan partai di mata publik berkaitan dengan politik simbol yang dimainkan partai, platform partai yang populer dan implementasi platform yang masif. Partai Aceh begitu kuat memainkan simbol politiknya. Simbol yang sering digunakan dalam marketing politiknya ialah Mou Helsinki dan UUPA. Kedua simbol tersebut ikut pula membonceng heorisme masa konflik dan perjuangan mempertahankan sejarah lama kejayaan Kerajaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda.

Salah satu contoh simbol yang dimainkan oleh Partai Aceh ialah melalui slogan. Slogan kampanye Partai Aceh “perdamaian dan perjuangan” menggiring publik pada beberapa perspektif. Slogan ini menyiratkan simbolisme yang berujung pada pola patronase. Slogan tersebut dapat dilihat sebagai sikap Partai Aceh yang akan menjamin perdamaian dengan jaminan kemenangan mereka pada kontestasi politik pemilu pada 2012. Dan sebelum perdamaian didapatkan, perdamaian hari ini tidak terlepas dari perjuangan mereka dulu. Pola perilaku pemilih atau konstituen terhadap Partai Aceh seperti menyiratkan ada pertukaran material. Patron telah melakukan perjuangan dan akan memberikan perdamaian, maka konstituen harus memilih mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap patron. Simbol tersebut telah membentuk perilaku memilih konstituen. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa “ada semacam persepsi dalam masyarakat aceh kalau Partai Aceh kalah, konflik akan merebak kembali. Masyarakat tidak ingin adanya konflik kembali di Aceh”.

Kampanye yang mereka lakukan dengan memainkan historis masa lalu. Mereka mengangkat isu perjuangan, perdamaian, Mou Helsinki dan UUPA sebagai kepemilikan produk yang mereka upayakan. Partai Aceh menyederhanakan kekuatan mereka yang

telah mengupayakan MOU Helsinki dan damai Aceh, dan berjanji bahwa mereka akan melanjutkan perdamaian dan implementasi Mou Helsinki secara penuh. Di mata masyarakat Partai Aceh akan memperjuangkan otonomi untuk Aceh, dan Partai Aceh telah dihadiahkan untuk pelayanan GAM untuk masyarakat Aceh. Implementasi janji politiknya tersebut semakin menggerus kenyamanan masyarakat Aceh akan dampak perdamaian yang hakiki. Lemahnya platform Partai Aceh yang membuat mereka harus mengangkat kembali isu konflik dan perdamaian untuk tetap menjaga stabilitas suara bagi partainya. Isi kampanye itu bisa saja dikatakan populer, tapi bukan kebutuhan nyata masyarakat. Pada akhirnya, keterikatan partai dengan konstituen hanya sebatas hubungan patron dengan klien. Kesetiaan konstituen terhadap pemberian dukungan kepada partai juga bersifat lemah.

Dari keempat aspek di atas, Partai Aceh dapat dikatakan lemah dari segi pelebagaan. Konsistensi kuatnya pelebagaan Partai Aceh hanya dapat ditemukan dari aspek otoritas keputusan. Di mana otoritas keputusan masih berada di partai tanpa pengaruh dari luar partai. Namun dari aspek kesisteman, reifikasi dan identitas nilai, Partai Aceh memperlihatkan melamahnya pelebagaan partai tersebut.

#### *Partai Aceh: Patronase dalam Pelebagaan Partai Menuju Konsolidasi Partai*

Konsep yang dikemukakan oleh Randall dan Svasands mengacu pada 4 dimensi tersebut memperlihatkan Partai Aceh masih mengalami kelemahan dalam hal pelebagaan partai. Namun di sisi lain, strategi pola patronase yang dikelola dan dijalankan oleh Partai Aceh dalam menjalankan partainya dipergunakan sebagai strategi untuk mencapai konsolidasi partainya. Baik konsolidasi di internal partai maupun eksternal partai dalam hal menjaga stabilitas dukungan akar rumput



di masyarakat dan pencitraan kekuatan di mata lawan politiknya. Pada dasarnya Partai Aceh punya peluang untuk mewujudkan pelembagaan secara kuat. Karena sebelum bertransformasi menjadi sebuah partai, partai aceh merupakan sebuah organisasi perlawanan yang memiliki basis internal yang terkonsolidasi dan mengakar kuat di masyarakat. Hanya saja perlu kiranya perubahan sistem komando pada gerakan separatis kepada pola yang lebih demokratis bagi partai politik sebagai instrument terwujudnya demokrasi. Pada kenyataannya pola patronase yang dipelihara oleh Partai Aceh untuk memaksimalkan pencapaian tujuan politiknya.

Patronase terdiri dari hubungan timbal balik antara patron dan klien. Patron yang dimaksud ialah aktor atau kelompok yang menggunakan pengaruhnya untuk membantu dan mengontrol orang lain, yang mana kemudian kliennya, kembali menyediakan pelayanan tertentu untuk patronnya. Ada material yang saling dipertukarkan oleh patron dan klien. Pertukaran tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kuatnya pemberi pengaruh kepada orang yang dipengaruhi. Karena struktur dari sistem patronase adalah hirarki parallel. Patronase dalam pelembagaan sebuah partai menjadikannya lemah secara kelembagaan. Namun akan menguatkan partai sebagai sebuah mesin politik. Mesin politik yang digunakan untuk pengumpulan suara dalam mencapai suara mayoritas di ranah elektoral. Ranah elektoral merupakan sesuatu hal yang terlepas dari penguatan internal partai. Karena yang terpenting ialah mendapatkan suara sebesar-besarnya.

Pola patronase bukan didasarkan pada ideologi atau platform. Relasi yang terbangun hanya di dasarkan pada pertukaran material. Pola patronase pada partai menggunakan sumber daya dalam pertukaran tertentu dan langsung antara klien dan politisi partai atau fungsionaris partai. Maka patronase mengacu pada cara politisi partai mendistribusikan pekerjaan publik atau dukungan khusus da-

lam pertukaran di ranah elektoral. Dapat di ibaratan bahwa patronase dalam sebuah partai menjadikan kunci hubungan antara “bos” dan “mesin politik” atau “jasa versus dukungan politik”. Elit Partai Aceh merupakan bos yang bertanggungjawab untuk mempertahankan legitimasi dimana meletakkan otoritas dalam penguasaan power di Aceh pasca konflik. Sedangkan anggota partai, lembaga informal pendukung di sekitar Partai Aceh serta konstituen merupakan mesin politik yang dapat mengantarkan Partai Aceh mencapai posisi penguasaan resources dalam politik di Aceh.

Bila kita berbicara tentang konsolidasi Partai Aceh sungguh tidak kompleks kalau kita tidak melihat pengaruh GAM didalamnya. Organisasi pembebasan yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 tersebut adalah cikal bakal lahirnya Partai Aceh sekarang. Hasan Tiro membangun semangat perlawanan rakyat Aceh berdasarkan historis sejarah ke Acehan dengan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination) dan resolusi yang menyatakan bahwa negara kolonial tidak boleh menyerahkan anak jajahannya kepada negara lain. Ketentuan inilah yang menyebabkan Hasan Tiro untuk meyabungkan kembali status Aceh sebagai sebuah negara berdaulat yang sempat terputus pada saat sultan Aceh terakhir ditawan oleh Belanda.

Historical tersebut terbawa sampai dengan pasca konflik. Namun konsep historical yang hanya berada pada tataran simbolis, bukan secara substantif seperti perjuangan Hasan Tiro dulu. Kemenangan Partai Aceh dalam kontestasi politik di tahun 2006, 2009 bahkan sampai dengan tahun 2012 tidak terlepas dari unsur historical tersebut. Unsur historical menjadi modal politik yang kemudian menciptakan sebuah kekuatan politik bagi Partai Aceh.

Kemenangan Partai Aceh pada pemilu 2009 dan pilukada 2012 sebagai bukti nyata bahwa mesin politik Partai Aceh dapat

bekerja secara maksimal. Ada pertukaran material antara elit partai, politisi atau fungsionalisme partai dengan mesin partai di grass-root. Historis semangat perlawanan yang dikomandoi oleh Hasan Tiro ikut hembuskan sebagai bentuk semangat baru dan keharusan memenangkan Partai Aceh. Dalam asumsi Partai Aceh, kemenangan Partai Aceh dianggap sebagai tolak ukur kemenangan perjuangan dan masyarakat Aceh. Secara kelembagaan mereka masih tergolong lemah, tapi sebagai sebuah kekuatan politik tidak menjadi permasalahan. Sebaliknya, dalam hal keberlanjutan partai sebagai alat demokrasi, maka ini akan menjadi penyebab yang riskan dalam berbicara keberlanjutan partai aceh sebagai sebuah partai di ranah demokrasi.

Pelembagaan partai politik dengan pola patronase diragukan untuk bertahan lama sebagai sebuah partai dari segi keberlangsungan dukungan politiknya. Pelembagaan partai yang tersentral pada pola patronase akan kontras dengan keterkaitan program, partai mampu untuk mengidentifikasi klien mereka secara individual. Serta mengikat dalam kontrak pertukaran hubungan di mana politisi menyediakan "good" dan pelayanan dalam pertukaran untuk banyak jenis dukungan. Apabila material yang ditukarkan tidak memiliki daya tarik maupun tingkat keperluan yang rendah, maka dukungan politik akan semakin memudar.

Setelah meraih kemenangan pada pilkada 2012 Partai Aceh langsung mengadakan restafel pengurus untuk tingkat provinsi. Jalan ini ditempuh untuk mengkonsolidasikan partai untuk menjalankan pemerintahan dan persiapan pemilihan legislatif untuk tahun 2014. Bercermin pada pemilu tahun 2009 Partai Aceh sukses mendulang suara hampir di semua kabupaten yang menjadi basis pergerakan GAM. Partai Aceh (PA) memperoleh suara mayoritas secara keseluruhan di 22 Kabupaten/Kota. Dengan catatan perolehan suara terdiri dari Kota Banda Aceh 6 kursi, Sabang 6 kursi, Aceh Besar 10 kursi, Pidie 34

kursi, Pidie Jaya 16 kursi, Bireuen 25 kursi, Aceh Utara 32 kursi, Lhokseumawe 14 kursi, Aceh Timur 25 kursi, Langsa 6 kursi, Aceh Tamiang 8 kursi, Aceh Jaya 14 kursi, Aceh Barat 7 kursi, Nagan Raya 4 kursi, Aceh Barat Daya 9 kursi, Simeulue 2 kursi, Aceh Tengah 3 kursi, Bener Meriah 3 kursi, Gayo Lues 1 kursi, Aceh Tenggara 1 kursi, Singkil dan Subulussalam 0 dan Aceh Selatan 10 kursi.

Gambaran perolehan suara di atas bisa kita lihat bagaimana struktur kerja partai begitu solid dan kuat, dimana partai yang dibentuk pasca konflik mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk membawa aspirasi rakyat Aceh. Konsep komando dalam perjuangan GAM tetap berlangsung di Partai Aceh, namun warna garis komandonya lebih mengarah pada pola patronase. Patron yang mengomandoi terletak pada satu pimpinan sebagai satu intruksi gerakan. Dalam struktur partai, komando dipegang kendali oleh ketua partai yaitu Muzakkir Manaf yang dulunya menjabat panglima militer GAM. Kemudian juga dibentuk struktur tuha peut sebagai penasihat partai yang terdiri dari sesepuh GAM yang dulunya aktif melakukan perjuangan di luar negeri, terutama patron terbesar terletak di tangan Malik Mahmud sebagai orang yang dituakan.

Konsolidasi partai untuk menuju partai yang modern terus dilakukan oleh Partai Aceh, jalan ini ditempuh untuk menyeimbangkan pergerakan partai dengan keadaan partai nasional yang sudah semakin mapan dalam ranah politik. Konsolidasi ini dilakukan dengan terus mengikat kader partai untuk terus diberikan pendidikan politik awal sebagai pondasi untuk memahami politik partai. Di sisi yang lain, Partai Aceh juga terus membuka diri dengan melibatkan semua masyarakat yang mau turut aktif dalam politik, dengan demikian stigmatisasi masyarakat bahwa Partai Aceh adalah salah satu partai untuk mantan kombatan akan hilang dengan sendirinya.

Konsolidasi Partai Aceh dalam politik telah dibuktikan dengan beberapa manuver politik partai yang sempat membuat cengan pemerintah Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan bahwa partai mempunyai pendukung yang solid dan pengurus partai yang patuh dengan aturan yang telah dirumuskan partai. Pelaksanaan Pemilukada Aceh tahun 2012 menjadi salah satu aktivitas politik lokal yang paling menarik dan mendapat tanggapan luar biasa baik di tingkat nasional maupun internasional. Pesta demokrasi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam mendorong demokratisasi lokal untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam mendorong pondasi tatakelola demokrasi di Indonesia. Bayangkan saja dalam kurun sebelum pelaksanaan pesta demokrasi tersebut terterjadi beberapa kali perubahan baik atas tahapan pelaksanaan pemilu-kada, jadwal pencoblosan hingga pembatasan dan penolakan atas calon perseorangan (independen) oleh anggota DPRA. Dalam kejadian di atas Partai Aceh adalah pemain tunggal yang berperan dalam proses penolakan calon independen dan pergeseran jadwal pencoblosan untuk pilkada.

Manuver kedua yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk terus menguji kesoliditan partai adalah dengan kembali mensahkan qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Dalam hal ini hampir semua elit partai yang duduk diparlemen baik tingkat provinsi dan kabupaten mendukung tentang bendera dan lambang Aceh untuk disahkan. Kemudian ditambah lagi dengan euforia dari masa pendukung Partai Aceh yang terus mengibarkan bendera lokal yang telah disahkan dengan tetap memberi dukungan untuk partai dalam mengukuhkan peraturan tersebut dan dapat diterima juga oleh pemerintah pusat.

Disamping itu juga menimbulkan reaksi penolakan oleh beberapa pihak yang menganggap DPRA tidak mengakomodir kepentingan rakyat terkait dengan bentuk bendera Aceh. Masa tandingan yang menolak

keputusan tersebut mengibarkan bendera merah putih dibeberapa titik di Aceh sambil melakukan protes terhadap kehadiran bendera dan lambang Aceh. Sengketa terhadap bendera dan lambang Aceh belum ditemukan titik temu yang memuaskan secara politik oleh kedua belah pihak. Serangkaian pertemuan telah dilakukan mulai pertemuan Batam, Makasar dan Bogor. Namun hasil pertemuan tersebut masih menuai kebuntuan kedua belah pihak.

Penolakan dan dukungan terhadap partai akibat disahkannya bendera dan lambang Aceh, tetap membuat Partai Aceh makin kokoh dan solid dalam melakukan konsolidasi partai. Dalam hal ini walaupun belum ditemukan titik temu yang jelas secara politik Partai Aceh masih memegang kendali atas keadaan politik yang terjadi di Aceh. Partai Aceh dengan kesoliditasnya terus melakukan kontrol terhadap gerakan partai baik di kabupaten ataupun ditingkat provinsi. Pengontrolan ini dilakukan pengurus partai untuk terus menjaga kesoliditan atas konsep politik yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan sesuai dengan keputusan tertinggi partai.

Dalam proses selanjutnya Partai Aceh terus melakukan kampanye-kampanye di daerah pedalaman Aceh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh tentang perjuangan partai yang sedang mereka rintis. Masyarakat di level bawah menyambut dengan antusias terhadap perjuangan partai, setiap kegiatan kampanye (ceuramah) ideologi yang diadakan oleh partai di surau (meunasah) masyarakat berbondong-bondong untuk datang mendengar dan mencari tau tentang sejarah pergerakan partai.

Kematangan Partai Aceh secara organisasi baik struktur pemerintahan dan pondasi keuangan partai yang sudah stabil membuat partai tetap stabil. Strategi kampanye partai yang dilancarkan dengan menggunakan taktik gerilya mengikuti struktur tempur GAM pada dahulunya. Dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana simpatisan partai digerakkan un-

tuk mendukung dan ikut berkampanye untuk calon yang diusung oleh Partai Aceh disuatu wilayah. Dalam melancarkan kampanye, partai sering sekali melakukan serangan kilat yang sporadis dan susah sekali ditebak oleh lawan politik. Langkah ini dilakukan dimana partai tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh KIP secara structural, tapi diluar structural simpatisan begitu antusias untuk tanpa ada paksaan melakukan konsolidasi untuk memperkuat dan berkampanye untuk partai.

Partai Aceh menjadi sebuah partai yang lemah dari sisi kelembagaan. Namun kuat dari konsolidasi meletakkan otoritas di panggung politik. Baik itu perpolitikan dengan elit di tingkat nasional maupun elit politik di tingkat lokal. Hegemoni otoritas mereka juga sangat berpengaruh di ranah electoral bahkan turut mempengaruhi proses electoral yang berlangsung, kebijakan publik, anggaran dan lain sebagainya. Strategi yang mereka luncurkan sangat kompleks memasuki berbagai sisi perpolitikan bahkan sampai ke masyarakat akar rumput.

## **KESIMPULAN**

Seiring dengan bergulirnya waktu, situasi Aceh tentu telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan bisa dimaknai secara positif maupun negatif bagi pelaksanaan dan masa depan demokrasi di Aceh. Walaupun tidak ada konsensus atau pemahaman yang jelas tentang transisi di Aceh, dari situasi perang menuju proses perdamaian yang demokratis dan pembentukan pemerintahan sendiri, pembentukan partai politik adalah langkah formal terakhir yang diamanatkan MoU Helsinki.

Hegemoni Partai Aceh membutuhkan kekuatan penyeimbang untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan demokrasi. Dalam kondisi demokrasi yang sedemikian rupa, Partai Aceh kemungkinan besar akan naik turun dengan kebijakan yang populis. Selama

tidak ada peluang menjanjikan bagi rakyat biasa untuk mengembangkan upaya-upaya alternatif yang lebih demokratis untuk mempengaruhi kepentingan publik dan akses pada sumber daya publik. Risiko utamanya otoritas disikapi oleh Partai Aceh dengan strategi hegemoni dan terpusat pada sistem patronase pada kalangan elit partai. Partai ini akan terus menjadi partai yang populis dengan menjual program-program populisnya. Di samping itu juga Partai Aceh akan terus membuka kesempatan atau perlakuan istimewa bagi kalangan profesionalitas dan para pakar, pegiat bisnis dan tokoh-tokoh utama dalam masyarakat. Kemudian partai akan terus mempertahankan hubungan yang erat dengan beberapa tokoh politisi nasional yang dapat mendukung kepentingan politik Aceh ditingkat nasional.

Partai Aceh dengan kompleksitas strategi politiknya menggiring partai pada pelemahan kelembagaan. Pola patronase yang menitikberatkan pada patron akan membawa partai ke arah penanaman benih faksionalisasi dalam tubuh partai sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Huntington (2004), selama organisasi masih mempunyai tokoh-tokoh anggota pertama dan selama tata caranya masih dilaksanakan oleh mereka, sampai begitu jauh kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri masih diragukan. Kondisi ini menciptakan faksionalisasi dalam tubuh Partai Aceh. Dapat dilihat dari pembentukan Partai Nasional Aceh (PNA) yang tidak lain adalah bagian dari Partai Aceh sebelum terjadi faksionalisasi. Dengan demikian perlu adanya perubahan penerapan pola patronase untuk meminimalisir faksionalisasi dalam kondisi gemuknya partai saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi, A. (2012). *Partai Aceh: Transformasi GAM?*. Yogyakarta: Jurusan Politik Pemerintahan UGM.

Huntington, S. 2004. *Tertib Politik: Pada Masyarakat yang sedang Berubah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muller, W. C. (2006). "Party Patronage And Party Colonization of The State" dalam *Handbook Party Politics* (Richard S Katz and William Crotty (Eds). London: Sage Publication

Palmer, B. (2010). "Service Rendered: Peace, Patronage and Post-conflict Elections in Aceh" dalam *Problem of Democratisation in Indonesia: Election, institutions and Society* (Edward Aspinall and Marcus Mietzner (Eds). Singapore: ISEAS

Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institut for Democracy and Welfarism

Randall, V dan L. Svåsand. (2002). *Party Institutionalization in New Democracies*. London: Sage Publications

Weingrod, A. (2008). *Patron, Patronage dan Political Party*. Vol. 10, No.4, pp. 377-400.

<http://kip-acehprov.go.id/>

<http://atjehlink.com/diusul-paw-darmuda-terima-kasih-kepada-pa/>

<http://aceh.tribunnews.com/>

<http://kip-acehprov.go.id/>

